

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ALIH DAYA UNTUK PEKERJA PENAGIHAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

SUSANTI ABDULWAPA

ABSTRAK

Pekerja Penagihan Kredit di perbankan merupakan pekerja Alih Daya yang hubungan kerjanya dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan biasanya dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pekerja Penagihan Kredit ditempatkan PPJP pada tempat kerja Bank berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Bank dengan PPJP dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa pekerja. Permasalahan yang terjadi pada Pekerja Penagihan Kredit yang bekerja di Bank dalam bentuk PKWT terus menerus dan perbedaan dalam pemilahan kegiatan penunjang untuk pekerjaan penyediaan jasa pekerja antara regulasi perbankan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja penagihan kredit yang dialih dayakan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa pekerja dan mengetahui pengaruh regulasi perbankan dengan aturan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Alih daya. Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menganalisa perlindungan hukum melalui tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisa yang didapat yaitu pekerja penagihan kredit dalam perjanjian Alih Daya merupakan pihak yang paling lemah secara hukum karena status kerja PKWT sehingga perlindungan hukum belum dapat dicapai. Bank membuat peraturan yang berbeda mengenai pekerja penagihan kredit dalam kegiatan penunjang yang membuat undang-undang tenaga kerja menjadi peraturan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dipatuhi.

Kata kunci : Perjanjian Alih Daya, Pekerja Penagihan Kredit

LEGAL PROTECTION IN OUTSOURCING AGREEMENT FOR DEBT COLLECTOR WORKERS OF BANK IN INDONESIA

SUSANTI ABDULWAPA

ABSTRACT

Debt Collector's worker in banking is a worker of Outsourcing and usually work in the form "temporary work contract" (PKWT) placed on the workplace in Bank by the Joint Working Agreement (PKB) between the Bank and The Outsourcing Company (PPJP) within the form of the provision of worker agreements. The problem that is still common in the debt collectors worker in the "temporary work contract" (PKWT) that can be done repeatedly and differences in choosing the activities support for the provision of services of worker between banking regulation and Labor Law. Debt collector worker is a job in the support activities in bank is different from support activities that regulated of Labor Law No. 13 of 2003. Purpose of this study was to know the legal protection for Debt collector worker in the form of a provider agreement services of worker and to determine the effect of banking regulation with the implementation of Outsourcing which regulated in labor law. To carry out this study, the authors analyze from legal purposes of Gustav Radbruch and method used in this research is a normative juridical research method with primary legal materials, secondary and tertiary. Data were collected by means of library research and the approach of jurisprudence. The analysis results obtained on Debt collector worker is the weakest party is legally in a variety of legal relationships that occur between employers, providers, and workers. This is because workers with job status within "temporary work contract" (PKWT) continuously so can not provide the bargaining position for workers in various levels of decision-making involving himself as subject of law in equal position so that legal protection can not be achieved. Banks make different regulations regarding debt collector is a job within supporting activities make labor laws into a regulation that does not have binding legal force and must be complied.

Keywords: Outsourcing Agreement, Debt Collector Worker